

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan yang biasa disebut sebagai kasus *honour killing* pasca meratifikasi Konvensi CEDAW. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *weak states* dan konsep patriarki. Penelitian ini berargumen bahwa fenomena *honour killing* di Pakistan merupakan suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan yang terjadi karena adanya kelemahan menyangkut kapasitas institusional dari Pemerintah Pakistan untuk membuat dan menjalankan suatu kebijakan disuatu negara baik itu dalam menjamin hak warga negaranya. Hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan adanya budaya patriarki dimana perempuan dianggap sebagai kelas kedua setelah laki-laki dan inferior baik itu di keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Sedangkan peran laki-laki dipandang lebih berkuasa dibanding dengan perempuan.

Kata kunci : Pakistan, CEDAW, *Honour Killing*, *Weak States*, Patriarki.

ABSTRACT

The primary aim of this research is to analyze the handling of women's human rights violations in Pakistan that commonly known as honour killing after ratifying CEDAW Convention. This research is analyzed by using weak states theory and partriachal concepts. This research argues that the phenomenon of honour killing in Pakistan is a case of human rights violations, especially against women, that occurred because there are the weaknesses of the institutional capacity of the Government Pakistan to make and implement a policy in their country whether it guarantees the rights of its citizens. This has a close relationship with the existence of a partriachal culture where women are considered as the second class after men and inferior position in family structures. While the role of men is seen as more powerful than women.

Keywords: *Pakistan, CEDAW, Honour Killing, Weak States, Patriachy.*